

PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN KHALWAT DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

Sri Tajul Alam

NPP. 29.0067

*Asdaf Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: sritajul05@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem Statement/Background (GAP): This research has the title "**The Role of Wilayatul Hisbah in Prevention of Khalwat in Lhokseumawe City**". **Purpose:** The purpose of writing this thesis is to find out how the role of Wilayatul Hisbah in preventing khalwat and to find out the supporting and inhibiting factors of Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah is an institution that oversees the implementation of Islamic Syari'ah in Aceh. With the Wilayatul Hisbah, it is hoped that the application of Islamic Syari'ah in Aceh can run optimally **Method:** The research method used in this research is qualitative with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research was carried out by the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah Office of Lhoskeumawe City. **Result:** Based on the results of the study, it can be concluded that Wilayatul Hisbah has carried out its duties and functions well but the results achieved have not been maximized. This is caused by several factors, one of which is the lack of communication between Wilayatul Hisbah and residents in preventing cases of violating Islamic Sharia. **Conclusion:** From the results of this study, the advice given by the researcher is that Wilayatul Hisbah should be able to increase cooperation with the community so that it can prevent Khalwat.

Keywords: Wilayatul Hisbah; Khalwat Prevention; and Role.

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini mengangkat judul "**Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat di Kota Lhokseumawe**". **Tujuan:** Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan khalwat serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah merupakan lembaga pengawasan

pelaksanaan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Dengan adanya Wilayatul Hisbah ini diharapkan penerapan Syari'at Islam di Aceh dapat berjalan optimal. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan Kantor Satual Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhoskeumawe. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun hasil dicapai belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah kurangnya komunikasi antara Wilayatul Hisbah dengan warga dalam mencegah kasus pelanggaran Syari'at Islam. **Kesimpulan:** Dari hasil penelitian ini, saran yang diberikan oleh peneliti yaitu sebaiknya Wilayatul Hisbah dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya khalwat.

Kata Kunci : Wilayatul Hisbah; Pencegahan Khalwat; dan Peran.

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Syari'at Islam merupakan hukum Allah yang membuat seseorang menjadi muslim, berisikan aturan dan hukum islam yang berguna untuk mengatur kehidupan manusia dan juga penyelesaian masalah yang berkenaan dengan segala sesuatu di dunia ini. Satu dari beberapa daerah di Indonesia yang memegang Syari'at Islam adalah Provinsi Aceh yang dikenal sebagai pusat penyebaran islam dinusantara. Pada masa Orde Baru, bangsa Indonesia melakukan banyak perubahan terkait dibidang demokrasi maupun desentralisasi. Namun banyak kebijakan yang tidak menguntungkan bagi kebanyakan masyarakat islam di Aceh, seperti banyaknya pemikiran yang digencarkan oleh para tokoh dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh di respon dengan terlaksananya DOM di Aceh yang lambat laun tergerus oleh arus politik disintegrasi bangsa.

Otonomi yang diberikan kepada Provinsi Aceh merupakan otonomi desentralisasi asimetris dimana kewenangan diberikan secara khusus kepada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap sebagai alternative untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah keinginan masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam. Bergantinya masa kepresidenan Soeharto dan digantikan oleh Habibie menjadi angin segar bagi kebanyakan masyarakat Aceh. Habibie merespon dengan baik pelaksanaan Syari'at Islam dengan mengeluarkan UU No 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan di Aceh (bidang agama, adat, pendidikan, dan kebudayaan) dimana dalam Pasal 4 ayat 1 dijelaskan: "Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat bagi pemeluk dalam Bermasyarakat. Selanjutnya dipertegas oleh UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Khusus. Kemudian dalam pelaksanaannya UU tersebut dipertegas lagi, dengan ditanda tangannya UU No 18 tahun 2001 yang dikenal oleh UU Nanggroe Aceh Darussalam Oleh Megawati. Dengan adanya UU

Nanggroe Aceh Darussalam tersebut, membuat pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang isinya menyangkut tata pelaksanaan Syari'at Islam yang dituangkan di dalam sebuah peraturan yang disebut Qanun.

Qanun merupakan peraturan per undang undangan sejenis perda yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat di Provinsi Aceh. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam pada Pasal 20 ayat (1) dan Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam aqidah, ibadah dan syiar islam, serta Qanun Aceh Nomor 12 tentang khumar dan sejenisnya, Qanun Aceh Nomor 13 tentang perjudian, Qanun Aceh Nomor 14 tentang khalwat sangat diperlukan sebuah lembaga yang khusus untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Dengan alasan inilah, pada tahun 2004 lahirlah lembaga Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang melanggar Syari'at Islam

Wilayatul Hisbah memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam dan menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan moral, agama dan budaya. Salah satu permasalahan Syari'at yang sering terjadi di masyarakat Aceh adalah Khalwat . khalwat adalah kondisi dimana pasangan yang sedang melakukan kegiatan hanya berdua di tempat yang bisa dikatakan sepi atau tidak terlihat dari pandangan orang lain. Merujuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 1 ayat (23) khalwat adalah tingkah laku antara dua (2) lawan jenis nonmahram yang tidak memiliki hubungan pernikahan ditempat tertutup atau tersembunyi dengan kemauan kedua belah pihak untuk melakukan perzinaan

Di zaman yang sudah moderen seperti saat sekarang ini, khalwat dapat dilakukan tidak hanya di tempat tempat sepi dan tertutup, tetapi juga bisa dilakukan di tengah keramaian bahkan tempat lain seumpunya didalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana pasangan pria dan wanita yang bukan mahram bermaksyuk padahal tidak ada ikatan pernikahan. Kota Lhokseumawe tercatat sebagai Kota teratas dengan kasus sex bebas pada tahun 2013. . Banyak nya tempat tempat di Kota Lhokseumawe yang berpotensi terjadinya pelanggaran Syariat Islam menyebabkan pelanggaran khalwat semakin meningkat tiap tahunnya.

Banyaknya pelanggaran di Kota Lhokseumawe khususnya disebabkan oleh pengawasan dan pembinaan yang belum optimal oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dan kesadaran masyarakat itu sendiri dan kurangnya pengawasan dan kepedulian dari masyarakat Kota Lhokseumawe.

Terlihat dari banyaknya fenomena yang terjadi di kawasan tersbut bedasarkan penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat di Kota Lhokseumawe.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan khalwat di Kota Lhokseumawe ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Misalnya kendala dipemerintah yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan Syari'at

Islam di Kota Lhokseumawe, terbatasnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana penunjang operasional dan terbatasnya sumber daya manusia atau aparat yang bertugas di kantor Wilayatul Hisbah apabila dibandingkan dengan beban tugas yang diberikan seperti melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe. Selain itu kompetensi anggota Wilayatul Hisbah juga masih rendah, hal tersebut dikarenakan tidak ada Pendidikan khusus bagi anggota di bisang Syari'at Islam dan wilayah Kota Lhokseumawe yang luas serta lokasi kantor yang hanya terletak di pusat kota menyebabkan Wilayatul Hisbah tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Lhokseumawe. Selanjutnya kendala yang ditemui dimasyarakat antara lain kurangnya koordinasi serta belum adanya regulasi yang mengatur bagaimana wewenang wasyarakat dan aparatur gampong dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Syari'at Islam. Tidak hanya itu, masyarakat belum berperan aktif dalam upaya pencegahan khalwat dan masih banyak masyarakat yang tidak mau peduli akan pelaksanaan Syari'at Islam

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Terdapat tiga penelitian sebelumnya. Pertama, Penelitian oleh Dicky Armada pada tahun 2021 yang berjudul "*Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe)*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit dari masyarakat yang berpendapat kontra terhadap penerapan Qanun jinayat dan masi banyak masyarakat yang belum memahami Qanun tersebut. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Kahidar Ikhsan pada tahun 2020 yang berjudul "*Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat di Mukim Lambaro Kecamatan peukan Bada Kabupaten aceh Besar*" penelitian ini menganalisis bagaimana peran Aparatur Gampong dalam mencegah terjadinya khalwat. Aparatur Gampong pada dasarnya dapat dikatakan sudah berhasil melaksanakan tugas serta tanggu jawabnya, hanya saja masih banyak masyarakat yang belum sadar dan memahami hukum Syari'at Islam. Beberapa cara dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya berkhalwat, salah satunya dengan membuat peraturan yang jelas tentang khalwat dan melakukan pengajian rutin untuk masyarakat. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Dahlan Ali yang berjudul "*Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang*" Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa yang menghambat pencegahan khalwat di Kota Sabang diantaranya lemahnya regulasi, kurangnya tenaga penyidik saran dan fasilitas yang terbatas. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan hanya dengan memberikan tindakan hukum kepada para pelanggar, akan tetapi sangat diperlukan pembinaan karakter, moral, dan akhlak.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam pencegahan Khalwat Di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh*” Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan induktif. Penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri, Arimbi dan Sentosa dimana ada lima dimensi yaitu peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam pencegahan khalwat serta mengetahui apasaja factor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan khalwat yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

1.5. Tujuan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan khalwat di Kota Lhokseumawe.

II. METODE (5-10%)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran berupa data dan fakta yang terjadi silapangan sehingga nantinya dapat menggambarkan bagaimana peran dari Wilayatul Hisbah. Penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun kelapangan untuk mengamati fenomena secara langsung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan Kantor Satual Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhoskeumawe

Penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan informan yang telah dipilih yaitu Kepala ‘at, Kepala Seksi Pembinaan dan penindakan, Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Dan Penindakan Syari’at Islam, Kepala Seksi Operasional dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun, Anggota Wilayatul Hisbah, Aparatur Gampong, dan masyarakat .Adapun analisisnya menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Arimbi, Heroepoetri dan Sentosa dimana ada lima dimensi yaitu peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran sebagai terapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Dalam pembahasan kali ini, peneliti akan menguraikan tentang fenomena yang dikaji, yaitu peristiwa dari hasil observasi dan pengkajian melalui data dan fakta yang

ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi, serta studi kepustakaan terkait peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kota Lhokseumawe.

Penulis menggunakan teori peran dari Heroepoetri, Arimbi dan Sentosa untuk menganalisis peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah khalwat. Dimana ada 5 dimensi yaitu, peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi

3.1 Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kota Lhokseumawe

3.1.1 Peran sebagai kebijakan

Wilayahul Hisbah berfungsi untuk mencegah masyarakat dari kemungkar dan mengajak kebaikan. Oleh sebab itu terwujudnya kehidupan berlandaskan Syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh Wilayahul Hisbah. Sistem pembuat kebijakan tidak dilakukan oleh satu unsur saja namun Wilayahul Hisbah perlu melakukan koordinasi dengan beberapa unsur lain.

Dalam pelaksanaannya, Bapak T.M Zuhri, SH,M.Hum selaku Kepala Bidang Penegakan Syari'at mengatakan bahwa dalam menyelesaikan kasus perkara khalwat untuk menentukan kebijakan, Wilayahul Hisbah melibatkan aparatur gampong serta masyarakat. Dalam pelaksanaannya Wilayahul Hisbah tidak langsung menghukum para pelaku dengan hukuman cambuk. Akan tetapi lebih menggunakan pendekatan-pendekatan seperti menegur secara langsung, kemudian memberikan peringatan secara tertulis dan memberikan pembinaan ataupun diselesaikan langsung di tempat.

Wilayahul Hisbah dalam merumuskan kebijakan tidak hanya melibatkan aparatur gampong saja. Masyarakat memiliki peran penting untuk membantu Wilayahul Hisbah dalam pencegahan khalwat. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang dikeluarkan perlu disepakati dengan semua pihak termasuk masyarakat setempat.

3.1.2 Peran Sebagai Strategi

Implementasi dari visi misi Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe untuk menegakkan Syari'at Islam dan mewujudkan Kota Lhokseumawe yang bernuansa islami menjadi indikator acuan terhadap standar pemenuhan tujuan yang lebih terarah dan sistematis. Strategi Wilayahul Hisbah dalam mencegah Khalwat dimulai dari masyarakat itu sendiri yaitu dengan menumbuhkan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk menegakkan Syari'at Islam. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengajian-pengajian rutin di setiap gampong.

Selain itu langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi dengan cara memberikan ceramah dan menyebar brosur kepada masyarakat Kota Lhokseumawe. Selain melakukan sosialisasi, strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan di beberapa wilayah di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan dilapangan pengawasan telah

dilakukan secara ketat di beberapa tempat wisata yang berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran Syari'at. Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya khalwat melakukan telah patroli di beberapa titik, seperti di kawasan waduk, seputaran pantai ujung blang, dan di pantai pulau semadu.

6Bapak TM. Zuhri, SH. M.Hum mengatakan bahwa langkah lain yang dilakukan adalah melakukan razia atau sidak secara tiba-tiba di caffe-caffe dan juga tempat karaoke. Untuk melancarkan strategi tersebut, Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat juga melibatkan instansi lainnya seperti pihak kepolisian, Dinas Syari'at Islam, TNI hingga masyarakat untuk bersama sama terjun kelapangan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran khalwat. Koordinasi dan kerja sama yang baik menjadi poin penting dalam membangun keterlibatan masyarakat sebagai sistem pencegahan perilaku yang menyimpang norma agama.

3.1.3 Peran Sebagai Alat Komunikasi

Salah satu kegiatan untuk menegakkan Syari'at Islam yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi Qanun kepada masyarakat Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk memberikan informasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at kepada masyarakat khususnya masyarakat pendatang yang ada di Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, pembekalan ilmu agama sejak dini melalui pendidikan agama di lembaga pendidikan juga dapat membantu Wilayatul Hisbah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham tentang pelaksanaan Syari'at Islam padahal Wilayatul Hisbah telah melakukan upaya agar masyarakat dapat menerima informasi terkait pencegahan khalwat, namun banyak masyarakat yang belum menerima informasi tersebut dikarenakan faktor-faktor tertentu.

Diantaranya adalah kesibukan masyarakat yang tidak dapat menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Hal tersebut menjadi hambatan bagi Wilayatul Hisbah dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan tidak selamanya berjalan dengan baik tentunya banyak kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah karena untuk menyampaikan pesan tidak mudah dilakukan. Dibutuhkan teknik komunikasi yang baik agar warga dapat menerima pesan yang disampaikan.

Namun diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan mendukung setiap gerakan yang dibuat Wilayatul Hisbah untuk mencegah terjadinya khalwat. Selain itu diharapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Agama

3.1.4 Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Sehubungan dengan ini, Wilayatul Hisbah dalam menyelesaikan perkara khalwat tentunya berpedoman kepada hukum yaitu Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dimana pelanggar khalwat dihukum dengan campuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara

paling lama 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan bagi para penyedia tempat atau fasilitas untuk berkhawat dikenakan sanksi dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan / atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan. Kasus perkara khalwat tidak selalu diselesaikan menurut ketentuan Qanun.

Peristiwa atau kejadian khalwat yang terjadi dan langsung didapati oleh Wilayahul Hisbah akan langsung ditangkap dan di proses. Apabila dapat diselesaikan secara adat melalui adat rapat gampong maka akan diselesaikan. Apabila perlu dibina, maka Wilayahul Hisbah akan melakukan pembinaan kepada pelanggar. Dalam proses penangkapan, Wilayahul Hisbah bekerja sama dengan kepolisian untuk terjun langsung ke lapangan. Penyidik Wilayahul Hisbah diberikan kewenangan khusus untuk dapat melakukan penyidikan di bidang Syariat Islam. Selanjutnya pihak kepolisian mengerahkan timnya untuk melakukan penyelidikan secara pasti apakah perbuatan tersebut termasuk khalwat atau bukan

Tabel 3.1
Rekapitulasi Intensitas Pelanggar Qanun Aceh No 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2020

NO	DELIK QANUN	BULAN	ORANG		TINDAK LANJUT						JUMLAH
			LK	PR	HUKUM		ADAT		PEMBINAAN		
					LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Pasal 23 Tentang khalwat	Januari	2	2	0	0	0	0	2	2	4
2		Februari	3	4	0	0	0	0	3	4	7
3		Maret	1	1	0	0	0	0	1	1	2
4		April	2	2	0	0	0	0	2	2	4
5		Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Juli	4	7	0	0	0	0	4	7	11
8		Agustus	3	3	0	0	0	0	3	3	6
9		September	2	2	0	0	0	0	2	2	4
10		Oktober	6	5	0	0	0	0	6	5	11
11		November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			23	26	0	0	0	0	23	26	49

Sumber: Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, 2020

Bedasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa penyelesaian khalwat lebih banyak diselesaikan secara pembinaan. Wilayahul Hisbah lebih mengedepankan pendekatan humanis, yaitu dengan memberi peringatan terlebih dahulu baik itu kepada para pelaku atau para penyedia fasilitas berkhawat. Apabila pelaku terus mengulangi perbuatan yang sama maka Wilayahul Hisbah akan mengeksekusi pelaku dengan hukuman

cambuk sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum. metode hukuman cambuk sangat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran Syari'at. Dampak yang ditimbulkan lebih kepada dampak psikologi.

3.1.5 Peran Sebagai Terapi

Peran wilayahul hisbah sebagai terapi dilakukan dengan langsung turun ke lapangan untuk mengawasi serta membina pelanggar khalwat dan masyarakat agar menghindari khalwat dan perbuatan yang menyimpang norma agama. Adapun jumlah pelanggaran Syari'at Islam yang telah ditangani di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe dari berbagai Qanun di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Pelanggaran Syari'at Kota Lhokseumawe 2020

NO	PEMBINAAN		HUKUMAN CAMBUK	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	86 Orang	88 Orang	3 Orang	2 Orang
2	Jumlah 174 orang		Jumlah 5 orang	
	Jumlah Total Keseluruhan 179 Orang			

Sumber: Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam, 2020

Bedasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa penanganan pelanggaran Syari'at Islam lebih banyak ditangani dengan cara pembinaan. Pembinaan dianggap alternatif terbaik untuk mengatasi permasalahan khalwat. Pembinaan juga tidak dilakukan oleh Wilayahul Hisbah, peran dari aparatur gampong dan masyarakat juga dibutuhkan. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah dengan menggelar pengajian rutin serta memberikan dukungan moral kepada pelaku. Masyarakat pun ikut membantu mengawasi perkembangan pelanggar khalwat dan rata-rata pelanggar khalwat berubah setelah dilakukan pembinaan.

Setiap pelaksanaan tugas tentu tidak selalu berjalan mulus, tentunya ditemukan kendala yang dapat menghambat pekerjaan setiap Organisasi dalam mencapai tujuannya. Faktor-faktor penghambat dalam pencegahan khalwat di Kota Lhokseumawe terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal antara lain kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan tingkat kompetensi personil yang masih rendah.

3.2 Faktor Penghambat dan Upaya Wilayahul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat

Selanjutnya faktor penghambat eksternal antara lain bahwa faktor eksternal yang menghambat Wilayahul Hisbah dalam mencegah Khalwat antara lain, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan Wilayahul Hisbah dan masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik terkait tugas dan fungsi dari

Wilayah Hisbah itu sendiri. Faktor-faktor penghambat tersebut bukan hanya kekurangan dari Wilayah Hisbah saja, akan tetapi kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar juga menjadi salah satu kendala dalam mencegah khalwat di Kota Lhokseumawe.

Untuk mengatasi hal tersebut, Wilayah Hisbah melakukan beberapa upaya diantaranya adalah dengan meningkatkan Kompetensi dan penambahan jumlah personil Wilayah Hisbah serta meningkatkan sumber daya aparatur. Selanjutnya memaksimalkan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang untuk memaksimalkan kinerja Wilayah Hisbah dalam melakukan patroli atau razia. Selain itu Wilayah Hisbah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam berkomunikasi untuk memudahkan warga berkomunikasi dengan Wilayah Hisbah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan Kesadaran Masyarakat melalui kegiatan keagamaan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penegakan Qanun Jinayat yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal. Sejak diberlakukannya qanun tersebut masih banyak terjadi pelanggaran Syariat Islam khususnya Khalwat di Kota Lhokseumawe. Pelaksanaan pengawasan Syariat Islam yang dilakukan oleh Wilayah Hisbah membawa dampak yang besar dalam mencegah terjadinya pelanggaran Syariat di Kota Lhokseumawe. Wilayah Hisbah sebagai Lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam tentunya tidak dapat dijadikan sebagai garda terdepan dalam mengurangi angka kasus pelanggaran khalwat. Dibutuhkan partisipasi serta peran aktif dari masyarakat dan instansi-instansi terkait. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat terutama generasi muda sudah menunjukkan keinginan untuk mengambil peran dalam mencegah terjadinya khalwat. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan patroli mandiri yang dilakukan tanpa pengawasan dari Wilayah Hisbah di tempat-tempat wisata yang berpotensi terjadinya pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe. Namun masyarakat masih belum memahami sejauh mana kewenangan yang diberikan dalam mencegah terjadinya pelanggaran Syariat Islam. Sehingga dibutuhkan regulasi yang mengatur bagaimana kewenangan masyarakat dan aparatur gampong dalam membantu peran Wilayah Hisbah dalam mencegah terjadinya pelanggaran Syariat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dahlan Ali yang juga menyebutkan bahwa lemahnya regulasi menjadi hambatan dalam pencegahan khalwat.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat masyarakat dalam mencegah terjadinya khalwat di Kota Lhokseumawe yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menegakkan Syariat Islam. Kita ketahui bahwa pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dan dorongan dari masyarakat. Masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pelanggaran Syariat Islam baik khalwat atau yang lainnya menyebabkan angka kasus pelanggaran khalwat terus meningkat. Hal tersebut menjadi tugas bagi

Wilayatul Hisbah untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat agar dapat Bersama sama untuk mencegah terjadinya khalwat di Kota Lhokseumawe.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Bedasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian tentang Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat di Kota Lhokseumawe, dari lima dimensi yaitu peranssebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi sudah baik hanya saja masyarakat masih belum memahami dan menganggap sepele pelanggaran khalwat serta belum mau bekerja sama sehingga belum menuai hasil yang optimal.

Ditemukan beberapa faktor yang menghambat Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas baik dari faktor internal maupun eksternal. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah khalwat. Diharapkan masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi penuh dalam pencegahan khalwat di Kota Lhokseumawe sehingga pelanggaran Khalwat dapat berkurang demi terwujudnya Kota Lhokseumawe yang berlandaskan Syari'at Islam.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan di beberapa Kecamatan dan Gampong di Kota Lhokseumawe dikarenakan jangkauan wilayahnya yang luas sehingga tidak merata ke semua wilayah di Kota Lhokseumawe

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar penelitian ini dilakukan di pada lokasi yang serupa namun merata di setiap gampong yang ada di Kota Lhokseumawe untuk menemukan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Ali, ed., *Wilayatul* (aceh, 2009)

ali gento, 'Penerapan Qanun Aceh No 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (Studi Kasus Penerapan Syari'at Kota Subulussalam)', 2019

Armanda, Dicki, 'Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat (Studi Dinas Syariat Kota Khokseumawe)'

Armanda, Dicky, Yusrizal Hasbi, and Romi Asmara, 'Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh', *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7.1 (2021), 18–28 <<https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>>

Bahri, Samsul, 'WILAYATUL HISBAH & SYARIAT ISLAM DI ACEH.Pdf', 2017

Berutu, Ali Geno, 'Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fik{ih Dan KUHP', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 87 <<https://doi.org/10.21154/MUSLIMHERITAGE.V2I1.1047>>

dahlan ali, 'Pencegahan Jarimah Khalwat Di Kota Sabang', 2021

Dakwah, Fakultas, D A N Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh, 'Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan', 2019

Junisa, Elvi, 'Peran Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)', 2019

Maiti, and Bidinger, 'Pengertian Peran', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (1981), 1689–99

Riva'i, Andi Kardian, *TinjauanTeori Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016)

Studi, Program, and Bimbingan Konseling, 'PERAN APARATUR GAMPONG DALAM PENCEGAHAN KHALWAT (Studi Di Mukim Lambaroh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)', 2019